

SKRIPSI

KEBIJAKAN MANAJEMEN
DALAM MENJAGA TRADISI KURIKULUM SALAF
PASCA ERA REFORMASI
DI MADRASAH ALIYAH QUDSIYYAH MENARA KUDUS
DI KABUPATEN KUDUS JAWA TENGAH



Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam

Disusun oleh :
Khafidh Noor Faizi
O6240030

Pembimbing I :
H. Andy Dermawan, M.Ag
NIP : 197009082000031001

Pembimbing II :
Siti Julaiha S. Ag. M.Pd.
NIP : 197710092005012003

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

H. Andy Dermawan, M.Ag
Dosen Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Khafidh Noor Faizi

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khafidh Noor Faizi
N I M : 06240030
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM MENJAGA
TRADISI KURIKULUM SALAF PASCA ERA
REFORMASI

Sudah dapat diajukan untuk munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam dalam Ilmu Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

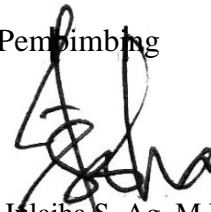
Yogyakarta, 12 Januari 2011

Pembimbing I



H. Andy Dermawan, M. Ag
NIP. 197009082000031001

Pembimbing



Siti Julaiha S. Ag. M.Pd
NIP;197710092005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 52230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 310/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM MENJAGA TRADISI
KURIKULUM SALAF PASCA ERA REFORMASI
DI MA QUDSIYAH MENARA KUDUS DI KAB. KUDUS**

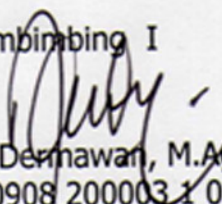
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Khafidz Noor Faizi
Nomor Induk Mahasiswa : 06240030
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 27 Januari 2011
Nilai Munaqasyah : **B+ (delapan satu koma enam)**

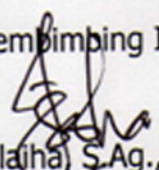
dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

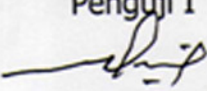
Pembimbing I


H. Andy Dermawan, M.Ag.
NIP. 19700908 200003 1 001

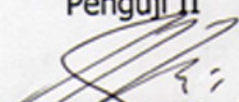
Pembimbing II


Siti Julaiha, S.Ag., M.Pd.
NIP.197710009 200501 2 003

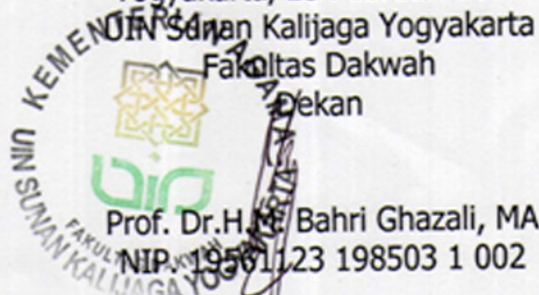
Penguji I


Drs. H.A. Machfudz Fauzy, M.Pd.
NIP 19531225 197903 1 001

Penguji II


Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
NIP. 19690401 199403 2 002

Yogyakarta, 23 Februari 2011


UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan
Prof. Dr.H. H. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561123 198503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini, selaku penulis skripsi menyatakan.

Nama : Khafidh Noor Faizi

NIM : 06240030

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah

Judul : **KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM MENJAGA KURIKULUM SALAF PASCA ERA REFORMASI DI MADRASAH ALIYAH QUDSIYYAH MENARA KUDUS DI KABUPATEN KUDUS JAWA TENGAH.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan skripsi saya ini adalah asli karya dan penelitian saya sendiri dan bukan *plagiasi* dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan keaslian skripsi, penulis sampaikan. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat nan berguna untuk pembaca.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 14 Februari 2011



Khafidh Noor Faizi

06240030

HALAMAN PERSEMBAHAN
SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHAN KEPADA:

ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA serta Baginda ROSULULLOH

Semua Sanak Family Di Kudus
AYAHANDA DAN BUNDAKU TERKASIH
ADIKKU – ADIKKU TERSAYANG
SEORANG YANG TELAH MASUK DALAM RONA HIDUPKU

ALMAMATERKU TERCINTA
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Teman-teman Seperjuangan Dalam Jurusan MD06
Santri LPY dan Santri MQ (2004)

Saudara-saudari KKY serta Anggota ALQY

Motto

Bismillah Niat Untuk Ibadah....

مَنْ يَرْكَبُ لِلَّهِ بِرَأْسِهِ خَيْرٌ يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ

“Barang siapa yang Allah kehendaki kebbaikanya maka Allah memfahamkannya dalam masalah agamanya. (dari Muawiyah riwayat Imam Bukhori: dalam buku Ikhtisar Hadits Shahih Bukhori, Karya Idrus Al-Kaaf. Hlm:22)”

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدد الأصح

“ Pemeliharaan terhadap perinsip terdahulu yang baik dan mengambil perinsip baru yang lebih baik (El-qudsy edisi 03/95 hal 06)”.

Berlaku Bijak Pada Diri Sendiri dan Orang Lain(Izi El-qudsy)

ABSTRAKSI

Khafidh Noor Faizi, 2010 Kebijakan manajemen dalam menjaga tradisi kurikulum salaf pasca era reformasi di Madrasah Aliyah Qudsiyyah Menara Kudus di Kabupaten Kudus Jawa Tengah

Kebijakan Manajemen adalah instruksi, petunjuk, atau perintah yang berlaku tetap dari manajemen puncak untuk menjamin keseragaman dalam memecahkan masalah yang sering atau selalu timbul Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan manajemen dalam menjaga tradisi kurikulum salaf pasca era reformasi. Kebijakan merupakan langkah awal dalam merumuskan kebijakan, baik dalam kebijakan jangka pendek serta jangka panjang.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan dan bersifat kualitatif deskriptif, proses untuk mendapatkan data antara lain dengan metode wawancara, pengumpulan data, analisis lapangan, dan dokumentasi.

Tujuannya untuk mendeskripsikan proses-proses kebijakan dan implementasi kurikulum salaf pasca era reformasi.

Adapun obyek penelitian ini adalah Madrasah Aliyah Qudsiyyah Menara Kudus Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang penulias pergunakan, yaitu (1) metode observasi yaitu untuk mengumpulkan data tentang situasi dan kondisi Madrasah Aliyah Qudsiyyah mengenai kurikulum (2) metode wawancara yaitu untuk mengumpulkan data tentang proses, implementasi, aktor perumus kebijakan mengenai menjaga kurikulum *salaf* serta bagaimana dampak dan tanggapan siswa mengenai kurikulum *salaf* tersebut. (3) metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau fariabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulan, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian seperti: struktur organisasi, gambaran lembaga Madrasah Aliyah, letak geografis, historis berdirinya lembaga, kantor Madrasah Aliyah, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Agar hasil penelitian dan penyusunan skripsi yang diperoleh yaitu mengenai proses serta imlementasi tradisi *salaf* analisis kebijakan yang digunakan dalam proses serta imlementasi tradisi *salaf* di kota Kudus yaitu dengan visi dan misi yang jelas sehingga setiap pembelajaran kurikulum *salaf* dapat berjalan dengan lancar dan tujuan organisasi yang berorientasi tentang pendidikan terealisasi.

Hasil penulisan skripsi ini antara lain, Proses yang dilakukan Madrasah antara lain, perumusan masalah, mencari solusi dan langkah dalam merumuskan kebijakan yaitu komunikasi dan melihat SDM. Dalam implementasi kurikulum Selama ini di Madrasah Qudsiyyah, dari tahun 1950-1968 sampai sekarang tetap mengacu kurikulum *salaf*, atas dasar “Ikutilah Kebaikan Dari Yang Terdahulu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Telaah Pustaka	11
G. Kerangka Teoritik	15
H. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Subyek dan Obyek Penelitian	21

3. Metode Pengumpulan Data	21
4. Metode Analisis Data	24
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II : GAMBARAN UMUM LEMBAGA	29
A. Identitas, Logo dan Letak Geografis Madrasah Qudsiyyah	29
B. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya	31
C. Dasar Hukum Lembaga	34
D. Visi, Misi dan Tujuan	35
E. Kurikulum Madrasah Qudsiyyah	36
F. Struktur Organisasi	39
G. Madrasah Qudsiyyah Menaungi Organisasi	39
H. Keadaan Guru dan Murid Madrasah Qudsiyyah	46
I. Sarana Prasarana Madrasah Qudsiyyah	48
BAB III : ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM MENJAGA	
KURIKULUM SALAF DI MADRASAH ALIYYAH	
QUDSIYYAH	50
A. Telaah Kebijakan Manajemen Madrasah Qudsiyyah	51
B. Analisis Kurikulum Salaf	56
C. Sebab-Sebab Adanya Kebijakan Kurikulum	61
D. Kebijakan Sebagai Proses	65
E. Aktor Perumus dan Penentu Kebijakan	69
F. Kebijakan Sebagai Output Madrasah	71
G. Implementasi Kebijakan Dalam Penerapan Kurikulum	73

H. Pandangan Siswa dan Masyarakat Tentang Kebijakan Manajemen	77
I. Analisis Kebijakan: Dampak Positif dan Negatif Bagi Madrasah	81
J. Evaluasi Kebijakan	85
BAB VI : PENUTUP	89
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran dan Kritik.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الفتاح العلام والصلاة والسلام على خير الانام سيدنا ومولنا محمد الحمد لله
وعلى اله وصحبه مددى اليالى والانام اما بعد

Rasa syukur kepada sang Rahman dan Rahim dengan ucapan Alhamdulillah, itulah sebagai bukti untuk berterimakasih terhadap sang Khaliq, atas di beri nikmat dapat melakukan penelitian dan menyusun sebuah karya tulis untuk meraih gelar strata 1, jalan yang berliku dan penuh rintangan serta kemampuan yang minim tidak menyurutkan niat bagi penulis untuk menyelesaikanya, segala kekurangan merupakan kelemahan sang penulis, dan sisi positif karya tulis ini hanya semata-mata karunia Allah S.W.T.

Alunan sholawat beserta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabat beliau, keluhuran akhlaq yang mulia dan luasnya ilmu menjadikan sebuah *kaca serta wasilah* bagi kaumnya. Ilmu yang mengalir dari beliau yang menjadikan terselesaikanya karya tulis ini.

Jalan nan panjang dan berliku dalam penyusunan skripsi ini menjadikan penulis sadar akan dangkalnya ilmu pengetahuan yang kumiliki, biaralah pergulatan penulisan ini tercatat dalam sanubariku, dan ini menjadikan motivasi serta kenanganku.

Tak terlupakan ucapan terimakasih pada beliau-beliau yang memberikan satu dan dua kata untuk karya ilmiah ini.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. Musya Asy'ari..
2. Prof. DR. Bahri Ghazali MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Siti Fatimah dan Ahmad Muhammad M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga .
4. H. Andi Dermawan M.Ag, selaku pembimbing akademik serta merangkap sebagai dosen pembimbing skripsi, yang senantiasa memberikan dorongan, semangat dan mencurahkan ilmunya sehingga dapat membantu untuk penyelesaian skripsi ini .
5. Ibu Siti Julaiha selaku pembimbing skripsi II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi ide-ide yang brilian serta pengarahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah yang berkenan menjadi pembimbing dan memberikan wawasan keilmuan dengan tulus dan ikhlas.
7. Bapak beserta seluruh staff yang ada dilingkungan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga atas perhatian dan pelayanan yang telah diberikan.
8. Pimpinan dan staff UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, serta daerah kabupaten Kudus yang telah memberi izin penelitian dan membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

9. Bapak Sunarwan yang telah memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran, dan senantiasa melantunkan do'a dengan penuh ikhlas demi tercapainya cita-cita ananda untuk meraih kesuksesan dimasa depan.
10. Almarhumah Ibunda Tercinta, senyum serta timanganmu menjadikan diriku merindukanmu.
11. Adik-adikku yang telah memberikan motivasi, saudara-saudaraku terima kasih atas dorongan dan do'anya demi keberhasilan diriku.
12. Ibu Nyai Nur Hidayah dan Abah Misbahul Munir Al-khafid kesabaran serta pesan-pesan moral yang engkau sampaikan sungguh berguna untuk mencapai keberhasilan.
13. Keluarga besar Pon-pes Al-Mujahadah Yogyakarta serta teman-teman santri beribu ucapan terimakasih atas suport dan doa-doa yang engkau lantunkan untukku, kebersamaan itu tiada aku lupakan.
14. Yang mulia guru-guruku, yang mengisi kekosongan jiwaku dengan ilmu, hikmah, *irsyad*, dan *ta'dib serta uswah* padaku.
15. Ucapan terima kasih kepada Madrasah Qudsiyyah dan segenap *muassis* yang telah memberi pengarahan dengan segenap kemampuan sehingga dapat terselesaikanya penelitian ini.
16. Terima kasih kepada teman-temanku seperjuangan Jurusan Manajemen Dakwah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sebagai teman sejati dan teman berbagi pengalaman yang tak mungkin terlupakan, canda tawamu membuat ku tertawa.

17. Semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan praktikum ini

Hasil penyusunan skripsi ini semoga bermanfaat kepada khalayak umum serta Allah meridhoi serta melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sebagai imbalan amal baik yang mereka lakukan terhadap proses penulisan skripsi ini. Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, maka saran dan kritrik untuk perbaikan karya ini sangat penulis harapkan.

Jazzakallaahu khoran katsiiraa.

Wassalamualaikum.....

Yogyakarta, 14 Januari 2011

Penyusun

Khafidh Noor Faizi
(06240030)

Daftar Tabel

- Gambar Tabel 1.1.** Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III
- Gambar Tabel 1.2.** Proses Kebijakan.
- Gambar Tabel 1.3.** Tabel Kelembagaan Madrasah Aliyah Qudsiyyah
- Gambar Tabel 1.4.** Logo Madrasah Qudsiyyah
- Gambar Tabel 1.5.** Struktur Organisasi Madrasah Aliyah.
- Gambar Tabel 1.6.** Rekapitulasi Murid Madrasah Qudsiyyah Dari Tahun 2003-
2011
- Gambar Tabel 1.7.** Rekapitulasi Murid Madrasah Qudsiyyah Khususnya Selain
Daerah Kudus
- Gambar Tabel 1.8.** Dimensi Waktu Output dan Outcomes Kebijakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami isi proposal yang berjudul **“KEBIJAKAN MANAJEMEN DALAM MENJAGA TRADISI KURIKULUM SALAF PASCA ERA REFORMASI DI MADRASAH ALIYAH QUDSIYYAH MENARA KUDUS DI KABUPATEN KUDUS JAWA TENGAH”** maka penulis perlu memberi batasan-batasan terhadap judul tersebut, khususnya dalam penegasan istilah yang ada di dalamnya, yaitu:

1. Kebijakan

Dalam kamus manajemen arti dari kebijakan (*policy*) adalah pernyataan cita-cita , tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹

Secara etimologis, kebijaksanaan merupakan terjemahan dari kata *policy*, dalam bahasa Inggris. Kata *policy* sebenarnya dapat dijumpai dalam bahasa bahasa lain seperti latin, Yunani dan *skrit*.²

Landasan yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. Namun demikian, akal manusia merupakan

¹ B.N Marbun. *Kamus Manajemen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 2003), hlm. 119.

² Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 12.

unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Suatu kebijaksanaan lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Bukan berarti bahwa suatu kebijaksanaan tidak mengandung unsur-unsur rasional.³

Membicarakan arti kebijakan pasti tidak akan lepas dari kebijakan publik karena kebijakan muncul dari sebuah kebijakan public, adapun arti kebijakan publik menurut *Harold Laswell dan Abraham Kaplan* adalah suatu program yang diproyeksikan tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktik tertentu.⁴

Titmus mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmus, kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*).⁵ Yang dimaksud kebijakan disini adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga Madrasah Qudsiyyah dalam mengimplementasikan kurikulum.

H. Hecllo mengatakan bahwa “ *policy is not... self evident term* ” (kebijakan bukanlah sebuah istilah yang jelas dengan sendirinya), karena itu *hecllo* menyarankan, dan sekaligus menunjukkan, bahwa “ kebijakan itu lebih baik jika dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau

³ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008), hlm. 16.

⁴ *Ibid.* hlm. 183.

⁵ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (Bandung : Alfabeta 2008), hlm. 7.

ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja dari pada dipandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan tertentu”. Pendapat lain dikemukakan oleh *WI. Jenkis*, yang memandang kebijakan sebagai “ *a set of interrelated decision... concerning the selection of goal and the means of achieving them whithin a spesified situation...*” Serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait... berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.⁶

2. Manajemen

B.N.Marbun dalam karyanya menyatakan arti manajemen proses penggerakan tenaga manusia, modal dan peralatan lainnya, secara terpadu untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.⁷

Adapun dalam kamus ilmiah populer manajemen mempunyai makna pengelolaan usaha; kepengurusan; ketataleksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan.⁸

Menurut *Joseph L. Massie* Manajemen adalah “ *gets things done through other people*” dan kata tersebut diperhalus oleh *Masie* yaitu : suatu proses dimana suatu kelompok secara kerjasama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-tehnik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkordinasikan kegiatan atau aktivitas orang-orang lain menuju

⁶ Sholichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan* (Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hlm. 40.

⁷ B.N Marbun, *Op. Cit*, hlm 155.

⁸ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola 1994), hlm. 435.

tercapainya tujuan bersama; para manajer sendiri jarang melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.⁹

Rumi menulis bahwa dalam Islam, pengertian manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan yang berlandaskan niat keridhoan Allah SWT, untuk mencapai tujuan-tujuan yang juga diridhoiNya. Sumber manajemen dalam islam adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah dan asasnya adalah akidah, *syara*, dan akhlaq.¹⁰

Jadi arti kebijakan manajemen adalah instruksi, petunjuk, atau perintah yang berlaku tetap dari manajemen puncak untuk menjamin keseragaman dalam memecahkan masalah yang sering atau selalu timbul.¹¹

Dari pengertian di atas dapat diartikan kebijakan manajemen adalah peraturan-peraturan yang dibuat melalui musyawarah bersama dan atas kesepakatan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan sesuai asas-asas dan visi-misi suatu instansi atau organisasi formal maupun non formal.

3. Tradisi Kurikulum Salaf

Kurikulum dalam arti sempit sekali adalah jadwal pelajaran, kurikulum dalam arti sempit adalah semua pelajaran baik teori maupun praktek yang diberikan kepada siswa-siswa selama mengikuti proses pendidikan tertentu, adapun kurikulum dalam arti luas adalah semua

⁹ Azhar Arsyad, *Pokok-Pokok Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 1-2.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

¹¹ B.N Marbun, *Op. Cit*, hlm 120.

pengalaman yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada anak didik selama mengikuti pendidikan.¹²

J. Galen Taylor dan Williams M. Alexander dalam buku curriculum planing for better teaching and learning (1956) menjelaskan arti kurikulum sebagai berikut “ *The curriculum is the sum total of school's efforts to influence learning whether in the classroom, on the playground, or out of school* ” jadi segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau di luar sekolah termasuk kurikulum. Kurikulum meliputi juga apa yang disebut kegiatan ekstra kurikuler.¹³

Kurikulum begitu luas dan bermacam-macam mata pelajaran dari yang sifatnya ilmu keislaman, ekstra kurikuler, praktik, dan sains, adapun kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum yang sesuai visi, misi, dan tujuan Madrasah Aliyah Qudsiyyah.

Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan. Apa yang direncanakan biasanya berifat idea, suatu cita-cita tentang manusia atau warga negara yang akan dibentuk. Kurikulum ini lazim mengandung harapan-harapan yang sering berbunyi muluk-muluk.¹⁴

Arti salaf adalah yang terdahulu¹⁵, jadi Kurikulum *salaf* adalah pelajaran berdasarkan keterangan ulama terdahulu dan sampai sekarang masih tetap menjadi pedoman, pegangan serta diikuti, yang terkait

¹² Suharsimi Ari Kunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media 2008), hlm. 131.

¹³ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara 2008), hlm. 4.

¹⁴ *Ibid*, hlm.8

¹⁵ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Op.Cit.* hlm, 689.

kurikulum *salaf* yakni pelajaran, nahwu, shorof, falak, balagh, fiqh dan masih banyak yang lainnya.

4. Era Reformasi

Era reformasi adalah era perubahan yang lebih dikenal dengan era di mana peralihan kekuasaan dari orde baru yang dipimpin Bapak Soeharto menjadi era reformasi yang kala itu Bapak B.J. Habibie diangkat menjadi presiden.

5. Madrasah Aliyah Qudsiyyah Menara Kudus

Madrasah Aliyah dalam kamus ilmiah populer diartikan sekolah menengah atas (Islam).¹⁶, Madrasah Aliyah merupakan organisasi pendidikan yang sekelas dengan sekolah menengah atas namun didalamnya banyak kurikulum-kurikulum atau mata pelajaran yang bernuansa islam.

Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah umum yang berciri khas agama islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.¹⁷

Nama Qudsiyyah diambil dari kata *Quds* yang berarti suci dan sekaligus nama kota tempat kelahiran madrasah tersebut, dan madrasah ini berada dalam satu kampung dengan Menara Kudus, masyarakat awam menyebut dengan Madrasah Menoro (Madrasah Menara).

¹⁶ Pius A Partanto, *Op. Cit*, hlm.423.

¹⁷ Keputusan Menteri Agama RI NO. 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyyah Pasal 1 Ayat 1 Dalam Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)* (Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998), hlm. 369.

6. Kabupaten Kudus Jawa Tengah

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kudus, berada di jalur pantai utara timur Jawa Tengah, yaitu di antara (Semarang-Surabaya), berada 51 km sebelah timur Kota Semarang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pati di timur, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di selatan, serta Kabupaten Jepara di barat.¹⁸

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Mutu pendidikan merupakan konsekwensi langsung dari suatu perubahan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan. Maksudnya perubahan dari segi politik maupun kebutuhan. Tuntutan terhadap mutu pendidikan tersebut menjadi syarat terpenting untuk dapat menjawab tantangan perubahan dan perkembangan itu. Hal itu diperlukan untuk mendukung terwujudnya manusia indonesia yang cerdas dan berkehidupan yang damai, terbuka dan demokrasi, serta mampu secara terbuka di era global. Untuk itu, pembenahan dan penyempurnaan kinerja pendidikan menjadi hal pokok, terutama terhadap aspek substantif yang mendukungnya; yaitu kurikulum.¹⁹

¹⁸ Data Bersumber Dari Website Kab Kudus. <http://www.kuduskab.go.id/#>, Tanggal Akses 3 November 2010

¹⁹ Sam M Chan dan Tuti T Sam, *Analisis kebijakan pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 99.

Ketetapan UU kurikulum muncul Menyusul hancurnya Orde Lama, keluar Ketetapan MPRS No XXVII/MPRS/1966 yang berisi tujuan pendidikan: membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti Pembukaan UUD 1945. Perubahan kurikulum seperti ini membuat problem sendiri bagi lembaga pendidikan yang notabnya swasta dari pihak manajemen harus berfikir bagaimana agar tidak meninggalkan peraturan yang lama (kurikulum yang dikeluarkan dari kebijakan manajemen sekolah) dan tanpa meninggalkan peraturan yang baru (kurikulum departemen agama) maupun kurikulum dari Diknas.

Dalam kurun waktu mulai orde baru sampai tahun 2003 UU tentang kurikulum sudah mengalami perubahan pada tahun 2004 muncul kurikulum KBK yang mengacu pebaharuan UU Sisdiknas kebijakan muncul mengenai kurikulum telah diberlakukan secara sah menurut UU Kurikulum Oleh Sisdiknas dan Depag, adanya kebijakan kurikulum yang sah dari Diknas dan Depag tidak keseluruhan di pakai oleh Madrasah Aliyah, namun Madrasah ini membuat sendiri kebijakan tentang kurikulum dan mengaplikasikan dengan kurikulum yang sudah ada.

Kebijakan dalam menentukan kurikulum yang diambil dengan tujuan agar menjaga dan meningkatkan mutu madrasah, kurikulum yang ada bila dibuat persentasi 60% mata pelajaran islam dan 40 % mata pelajaran umum, inti dari kebijakan pembaharuan kurikulum, dilatarbelakangi beban jam mata pelajaran dari lokal dan eksra kurikuler juga tugas justru membuat siswa tidak ada waktu istirahat, kebijakan yang diambil jam mata pelajaran dikurangi 20%

.kebijakan kebijakan untuk mengikutkan pendidikan perlu adanya pembenahan kurikulum yang memberikan kemampuan dan ketrampilan dasar merupakan konsep belajar tuntas dan membangkitkan sikap mandiri siswa.²⁰

Rintangan yang begitu berat telah menghampiri madrasah ini dalam kurun waktu yang sangat panjang, pengambilan kebijakan untuk menentukan kurikulum sudah dilakukan mulai beliau sejak pendiri madrasah ini yaitu KHR. Asnawai telah menerapkan konsep dan norma keislaman atau dengan bahasa pesantrenya adalah madrasah menggunakan konsep *salaf*.

Pendidikan agama Islam, khususnya yang berlandaskan ajaran ulama *salaf* sangat penting untuk dipertahankan. Sebab, ajaran *salaf* ini sebagai pondasi dalam mengembangkan ajaran Islam.²¹

Kebijakan mengenai kurikulum dari Depag dan Diknas telah berubah, perubahan kurikulum sendiri harus ditanggapi secara bijak oleh instansi lembaga pendidikan bagaimana dapat mencermati isi dan mengaplikasikan dengan kebutuhan sesuai visi-misi dan tujuan lembaga pendidikan, implementasi kebijakan tentang kurikulum tentunya tidak mudah diterima dalam internal lembaga terlebih untuk masyarakat luas, dapat dikatakan penentuan kebijakan tentang implementasi kurikulum yang tidak sesuai akan menuai protes dari elemen yang terkait.

Dalam sejarah Madrasah Aliyah Qudsiyyah kebijakan kurikulum sebenarnya sudah ada jauh dari tahun 2003, yakni awal mula dibuka Madrasah

²⁰ Kunandar, *Guru Profesional implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 91.

²¹ Radar Kudus, *Dalam Acara Ma'had Qudsiyyah diresmikan*. (Selasa, 2 Nopember 2010). hlm. 2.

Aliyah kebijakan manajemen dalam kurikulum sudah tertanam di Madrasah tersebut. Dari pihak manajemen tidak berani mengubahnya akan tetapi mengembangkan tetap dilakukan.

Dalam menentukan kebijakan agar dapat berpengaruh pada sebuah organisasi terlebih pada organisasi swasta seperti Madrasah Aliyah ini tentunya memerlukan proses yang panjang.

Secara logika suatu perubahan secara pasti akan mengalami proses yang panjang dan berliku, salah satu contohnya proses bayi dalam kandungan; pertumbuhan bayi mengalami beberapa fase, dari gumpalan darah lalu adanya ruh dan sampai benar-benar menjadi bayi yang lengkap dengan kepala, kaki, serta bagian-bagian lain yang berada dalam tubuh manusia, begitu pula proses kebijakan yang tidak secara tiba-tiba ada serta berkembang tanpa adanya proses yang begitu rumit. Dari sedikit pembahasan diatas, maka studi analisis kebijakan sangat perlu untuk dikaji dan dibahas secara mendalam.

Setelah semua itu berjalan proses dan Implementasi sebuah lembaga khususnya Madrasah Qudsiyyah harus mengevaluasi untuk hasil kedepan lebih baik.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses kebijakan manajemen dalam menjaga tradisi kurikulum salaf pasca era reformasi?
2. Bagaimana implementasi kebijakan manajemen dalam menerapkan kurikulum salaf pasca era reformasi?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana proses kebijakan manajemen dalam menjaga tradisi kurikulum salaf pasca era reformasi di Madrasah Aliyyah Qudsiyyah Menara Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan manajemen Madrasah Aliyyah Qudsiyyah Menara Kudus dalam implementasi kurikulum salaf pasca era reformasi di Madrasah Aliyah Qudsiyyah Menara Kudus.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara teoritik dapat menjadikan sumbangan wawasan serta bahan pemikiran bagi keilmuan terhadap proses kebijakan manajemen bagi Fakultas Dakwah khususnya jurusan Manajemen Dakwah dan secara umum bagi instansi formal maupun non formal.
2. Secara praktis dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan mengenai bagaimana konsep yang sistematis mengenai kebijakan manajemen dan menanggapi adanya sebuah isu-isu tentang adanya perubahan kurikulum.
3. Bagi manajemen sebagai feedback Madrasah Aliyah Qudsiyyah dalam menentukan kebijakan sehingga terjaga kualitas dan mutu sehingga semakin membaik.

F. TELAAH PUSTAKA

Penelitian tentang Kebijakan Manajemen Dalam Menjaga Tradisi Kurikulum Salaf Pasca Era Reformasi Di Madrasah Aliyah Qudsiyyah

Menara Kudus Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, adapun data yang penulis peroleh dari survey dan observasi di UPT-S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , menunjukkan bahwa kajian untuk penulisan ini belum pernah ada kesamaan dalam obyeknya yaitu di Madrasah Aliyah Qudsiyyah Menara Kudus namun ada kesamaan dalam kebijakan, yaitu skripsi Saudara Nur Muhammad Bintoro dengan judul Kebijakan Pelaksanaan pendidikan Agama islam Di SMP “ Remaja ” Parakan (tinjauan historis), pembahasan Skripsi ini terfokus tentang pelaksanaan pendidikan agama islam, faktor-faktor mempengaruhi, dan meninjau dari materi, metode, dan alokasi waktunya di SMP “ Remaja ” Parakan.

Nur Muhammad menulis dalam latar belakang masalah berkisar tentang pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama disekolah umum yang masih banyak mengalami kendala akan tetapi ada sekolah yang telah konsisten. Nur Muhammad merumuskan masalah sebagai berikut.²²

1. Bagaimana kebijakan SMP “ Remaja ” Parakan terhadap pelaksanaan pendidikan agama islam di sekolah tersebut?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kebijakan pelaksanaan pendidikan agama islam di SMP “ Remaja ” Parakan?
3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama islam di SMP “Remaja” Parakan ditinjau dari materi, metode, dan alokasi waktunya.

²² Nur Muhammad Bintoro, *Kebijakan Pelaksanaan pendidikan Agama islam Di SMP “ Remaja ” Parakan (Tinjauan Historis)*. (Uin Suka Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2005)

Dalam kesimpulan, skripsi Nur Muhammad dapat diketahui isinya sebagai berikut:

1. Keputusan THHK parakan sebagai lembaga pendidikan netral juga diikuti oleh yayasa pendidikan “ Remaja ” parakan yaitu yayasan pendidikan “ Remaja ” Parakan bukan sebagai lembaga pendidikan yang berdasarkan agama, akan tetapi penyelenggaran pendidikan agama.
2. Kebijakan pelaksanaan pendidikan agama islam di SMP “ Remaja ” Parakan diputuskan dan dilaksanakansejak SMP itu berdiri, yaitu tahun 1958.
3. Kebijakan ini tidak terpengaruh oleh Undang-Undang pendidikan. Sebab Undang-undang yang berlaku pada waktu itu hanya mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah negeri sedangkan SMP “ Remaja ” Parakan adalah sekolah swasta.
4. Salah satu faktor utama dikeluarkanya kebijakan pelaksanaan pendidikan agama islam di SMP “ Remaja ” Parakan adalah sejarah perjalanan dan hubungan yang baik antara warga tionghoa dengan warga kota parakan khususnya umat islam sejak zaman sebelum Indonesia merdeka.

Demikian juga skripsi yang ditulis oleh Chotimatul Zainiah yang berjudul “*Kebijakan Pendidikan Orde Baru dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Umum (Studi Atas Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 1994)*”. Dalam latar belakang masalah tertulis tentang

pergeseran warna dunia pendidikan islam yang sudah semakin mengikuti arus kemajuan zaman dengan mengikuti kebijakan dari pemerintah, adapun pembahasan skripsi ini mengulas tentang realitas politik pada masa pemerintahan orde baru dan keterlibatan pemerintahan orde baru dalam membuat kebijakan terhadap kurikulum pendidikan agama islam, isi pokok skripsi ini mengenai percaturan politik mengenai kebijakan pendidikan dalam kesimpulan telah tertulis bahwa kebijakan pemerintahan orde baru selalu tidak menguntungkan posisi politik umat islam, perjalanan pendidikan islam pada masa orde baru mengalami dinamika yang cukup dialektis dan dengan berbagai tantangan serta hambatan dalam realisasinya, serta kurikulum PAI SMU tahun 1994 wajib diimplementasikan pada seluruh Sekolah Menengah Umum baik swasta maupun negeri.²³

Ada juga skripsi yang ditulis oleh Nasrulloh pada tahun 2004 dengan judul “ *Dinamika Kurikulum Madrasah Aliyah pasca UU No. 2 Tahun 1989 (Studi atas Kebijakan Departemen Agama)* ”, latar belakang masalah skripsi ini secara konkrit menyebutkan adanya perubahan UU tentang sistem pendidikan, maka dari itu harus disikapi dan dikaji dengan seksama oleh Departemen Agama dalam menentukan kurikulum, skripsi ini mengutarakan tentang kebijakan Departemen Agama terhadap kurikulum Madrasah Aliyah pasca UU No 2 tahun 1989, serta faktor-faktor yang menghambat dalam mengeluarkan kebijakan kurikulum, kesimpulan yang diambil adalah kurikulum mendapatkan sorotan serta perhatian khusus dari Departemen

²³ Chotimatul Zainiah, *Kebijakan Pendidikan Orde Baru dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum (Studi Atas Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 1994)*, (Uin Suka Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2004)

Agama dari pihak yang berwenang telah mengembangkan kurikulum secara variatif sesuai perkembangan zaman.²⁴

G. KERANGKA TEORITIK

1. Tinjauan Tentang Kebijakan

Kebijakan umumnya di anggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mencakup seluruh bidang (*universe*) tempat tindakan akan dilakukan. Kebijakan biasanya berlangsung lama. Nyatanya kebijakan cenderung untuk berlaku lama tanpa peninjauan dan penyempurnaan. Kebijakan mengafahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan. Kebijakan adalah alat untuk mencapai suatu tujuan dan karena itu menerangkan apa yang seharusnya dilakukan sebagai dari apa yang sedang dilaksanakan.²⁵

Kajian kebijakan akan menyangkut pemahaman terhadap pembuat dan penyempurnaan suatu kebijakan. Dengan demikian lingkup studi kebijakan sangat luas dari sebab-sebab ditetapkannya suatu kebijakan, yang

²⁴ Nasrulloh, *Dinamika Kurikulum Madrasah Aliyah Pasca UU No.2 Tahun 1989. (Studi Atas Kebijakan Departemen Agama)*. (UIN Suka Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2004)

²⁵ George A Steiner dan John B Miner, *Kebijakan dan Manajemen Strategi*, (Jakarta: Erlangga 1997), hlm. 22.

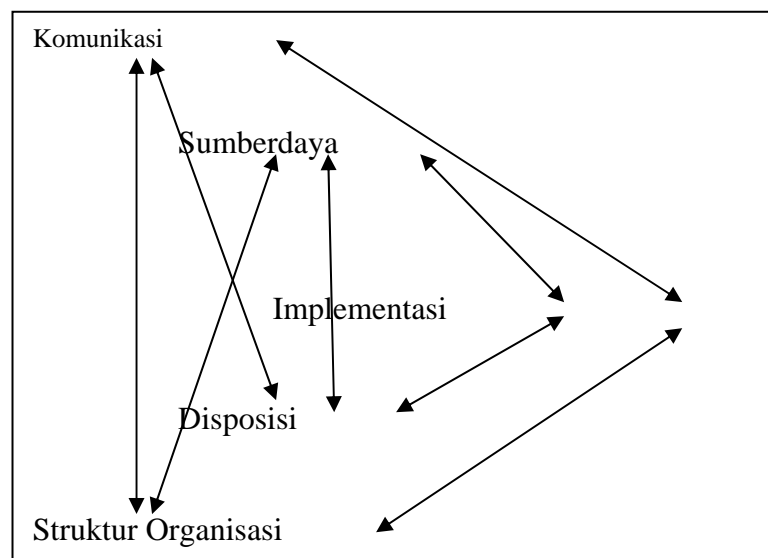
meliputi isi kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan serta dampak suatu kebijakan.²⁶

2. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dari George C. Edwards III mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi dalam implementasi kebijakan, dalam pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni.²⁷

Faktor itu adalah: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi.

Gambar 1.1. Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III



²⁶ Miriam Budiarjo dan Tri Nuke Pudjiastuti, *Teori-teori Politik Dewasa Ini*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 230.

²⁷ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 89.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, serta sifat demokratis.

4. Struktur Birokrasi

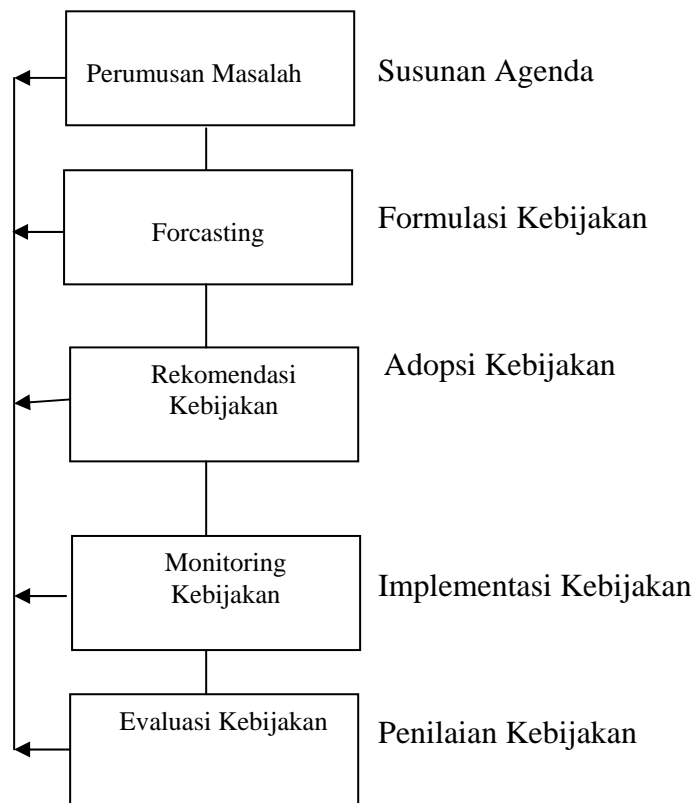
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

3. Proses-proses Kebijakan

Proses kebijakan itu mencakup apa yang disebut “ *the actions and interaction that produce the authorities ultimate choice of a particular policy content over its rivals* ” (tindakan-tindakan dan iteraksi yang menghasilkan pilihan akhir yang sah mengenai suatu kebijakan tertentu setelah diperbandingkan dengan pilihan-pilihan lainnya).²⁸

Ada beberapa teori mengenai proses-proses kebijakan, yang pertama dari *William N. Dunn*, yang menggambarkan proses kebijakan seperti di bawah ini.²⁹

Gambar 1.2 Proses Kebijakan.



²⁸ Sholichin Abdul Wahab, *Op.Cit*, hlm 53.

²⁹ . Subarsono, *Op.Cit* hlm. 9.

Sedangkan *James Anderson* sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut.³⁰

- a) Formulasi masalah (*problem formulation*)
- b) Formulasi kebijakan (*formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut.
- c) Penentuan kebijakan (*adoption*)
- d) Implementasi (*implementation*)
- e) Evaluasi (*evaluation*)

4. Aktor-Aktor Penentu Kebijakan

Dalam pandangan *Dror*, para aktor yang memainkan peran dalam proses pembuatan kebijakan publik di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai berikut.³¹

1. Individu secara perorangan sebagai pemilih,
2. Golongan Intlektual,
3. Para pejabat yang menduduki posisi kunci dalam pembuatan kebijakan,
4. Badan legislatif,
5. Badan Eksekutif,
6. Birokrasi Pemerintah,
7. Badan peradilan,
8. Partai-partai Politik,

³⁰ *Ibid*, hlm.12

³¹ Sholichin Abdul Wahab, *Op.Cit*, hlm 64-69.

9. Universitas, serta
10. Kelompok-kelompok kepentingan.

5. Implementasi Kebijakan.

Jadi mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami “apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan atau legalitas kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberi dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”.³²

Adapun yang dimaksud dengan judul yang di atas adalah pernyataan tujuan untuk mengelola secara efektif penerapan konsep, ide, gagasan, serta pendapat mengenai bagaimana kebijakan serta implementasi kurikulum di Madrasah Aliyah Qudsiyyah pasca era reformasi.

H. METODE PENELITIAN

1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian analisis kebijakan, dan bersifat deskriptif yaitu yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.³³

³² Sholichin Abdul Wahab, *Op.Cit*, hlm 176.

³³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan “kualitatif”, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah suatu kesatuan (unit), orang atau peristiwa maupun daerah yang diteliti secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara lengkap.³⁵

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Salah Satu Pengurus Madrasah Qudsiyyah
- b. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Qudsiyyah
- c. Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Qudsiyyah
- d. Pihak-pihak Yang Terkait (Siswa dan Masyarakat)

Selanjutnya yang menjadi obyek adalah permasalahan yang fokus dalam penelitian ini, yaitu: Kebijakan Manajemen Dalam Menjaga Kurikulum *Salaf* Pasca Era Reformasi Di Madrasah Aliyah Qudsiyyah Menara Kudus Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data, penulis memilah data yang diperoleh dengan menggolongkan menjadi dua data;

- a. Data primer

Data primer sering disebut data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan

³⁴ Lexy J Moleong, *Metopen Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 4.

³⁵ Margono , *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 9.

menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁶ Data primer mencakup data yang diperoleh dengan menggunakan tehnik Observasi dan Wawancara.

Observasi merupakan metode ilmiah dalam mendapatkan data, Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi partisipan, disebut observasi partisipan jika ada orang yang mengadakan observasi (disebut observer) turut ambil bagian dalam perikehidupan orang atau orang-orang yang diobservasi (disebut *observers*).³⁸

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)³⁹.

Dalam wawancara ini penulis akan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan tema yang ada, yaitu: *pertama*, Salah Satu Pengurus Madrasah Qudsiyyah, *kedua*, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Qudsiyyah, *ketiga*,

³⁶ Saifudin Azwar, *Op.Cit*, hlm. 91.

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metdologi Research jilid-2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm.136.

³⁸ *Ibid*, hlm. 158.

³⁹ Moh. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 234.

Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Qudsiyyah, *serta* Pihak-pihak Yang Terkait.

Ada beberapa cara atau tehnik dalam wawancara yang di gunakan penulis, yakni: Wawancara mendalam: Sebagai alat pengumpul data, wawancara banyak digunakan dalam penelitian pendidikan. Ada kelebihan dari wawancara ini, yakni penulis bisa kontak langsung dengan responden, sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara lebih bebas dan mendalam. Lebih dari itu hubungan dapat dibina lebih baik sehingga responden bebas mengungkapkan pendapatnya⁴⁰. Penulis menggunakan teknik wawancara mendalam dengan subyek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan, mendalami situasi, dan mengetahui informasi untuk mewakili lembaga tempat penelitian serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara bisa direkam sehingga data atau informasi bisa lebih lengkap.

Yang *kedua* Penulis menggunakan jenis interview bebas terpimpin, artinya penginterview membawa kerangka pertanyaan (frame work question) untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama (timing) interview diserahkan kepada kebijaksanaan interviewer.⁴¹

⁴⁰ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001) hlm. 102.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta : Andi Offset, 2001), hlm. 207.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua diperoleh melalui data-data dokumentasi yang diperoleh dari pihak yang berwenang.⁴²

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.⁴³

4. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut analisis dengan metode deskriptif analisis. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁴

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :⁴⁵

a. Reduksi Data (Data *Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

⁴² Ibid, hlm. 91.

⁴³ Suharsono Ari Kunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rini Kartika, 2002), hlm. 2006.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hlm.103.

⁴⁵ Sugiono, *Op.Cit*, hlm. 92.

b. Penyajian Data (Data *Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flochart* dan sejenisnya.

c. *Conclusion Drawing / verifikasi*

Langkah yang ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

5. Pedoman Wawancara

Untuk mendapatkan data-data penulis melakukan pengumpulan data, agar sesuai dengan yang diharapkan penulis melakukan wawancara, observasi, dokumentasi.

Dalam wawancara penulis akan mewawancarai: Salah Satu Pengurus Madrasah Qudsiyyah, *kedua*, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Qudsiyyah, *ketiga*, Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Qudsiyyah, *serta* Pihak-pihak Yang Terkait.

Adanya wawancara tentu pula ada sebuah pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan itu antara lain:

1. Apa arti dari kebijakan?
2. Sejak kapan kebijakan itu ada?
3. Apa arti kurikulum salaf?
4. Bagaimana proses merumuskan dan membuat kebijakan?
5. Bagaimana implementasi kurikulum salaf?
6. Apa sebab-sebab adanya kebijakan tentang kurikulum salaf?
7. Siapa aktor-aktor yang terlibat dalam merumuskan dan membuat kebijakan?
8. Adakah evaluasi sesudah kebijakan ditentukan?
9. Apakah hasil kebijakan itu bentuk dari sebuah output madrasah?
10. Apakah bapak ikut dalam merumuskan dan menentukan kebijakan?
11. Bagaimana anda merespon tentang kebijakan madrasah tentang kurikulum?
12. Dari Manajemen apakah hanya menggunakan kurikulum salaf?

Adapun observasi yang penulis lakukan adalah dengan melihat kondisi dan keadaan Madrasah Aliyah Qudsiyyah secara langsung khususnya mengenai tema yang di atas.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dan mendapatkan hasil pembahasan yang sistematis dari skripsi ini, penelusuran hasil pengkajian ditata dengan sistematika sebagai berikut:

Yang pertama pada bab pendahuluan yang berisi: penegasan judul, dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami judul ini, selanjutnya latar belakang masalah berisi penjelasan mengapa penulis memilih

tema ini , lalu tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka. Dan setelah itu di sajikan pula kerangka teoritik sebagai bahan acuan untuk menganalisis data-data yang diperoleh. Pada Bab Pendahuluan ini akan di akhiri dengan metode penelitian, jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Selanjutnya dalam bab II berisi gambaran umum lembaga serta letak geografis Madrasah Qudsiyyah, lalu di jelaskan sejarah berdiri dan perkembanganya, dasar hukum lembaga, visi, misi dan tujuan, setelah itu dalam bab II dipaparkan kurikulum salaf Madrasah Qudsiyyah, struktur organisasi, keadaan guru, dan keadaan murid Madrasah Qudsiyyah, serta yang terakhir sarana prasarana madrasah Qudsiyyah.

Sedangkan dalam Bab III akan di paparkan analisis kebijakan manajemen dalam implementasi kurikulum di Madrasah Aliyah Qudsiyyah, telaah kebijakan manajemen Madrasah Qudsiyyah, analisis kurikulum *salaf*, sebab-sebab adanya kebijakan kurikulum, kebijakan sebagai proses, aktor perumus dan penentu kebijakan, kebijakan sebagai output Madrasah, implementasi kebijakan dalam penerapan kurikulum,serta diakhiri dengan pandangan masyarakat tentang kebijakan manajemen, dan analisis kebijakan: dampak positif dan negatif bagi Madrasah.

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi, isi Bab ini adalah kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Setelah penguraian hal-hal tersebut maka selesailah penulisan skripsi. Bagian terakhir berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, instrumen penelitian dan lampiran-lampiran

yang dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dan menjadi rujukan serta pembahasan dalam skripsi.

Bagian terakhir berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, instrumen penelitian dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dan menjadi rujukan serta pembahasan dalam skripsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses dan implementasi kebijakan mengenai kurikulum pada lembaga pendidikan mempunyai gaya dan ciri khas yang berbeda, model implementasi dan proses ada yang menggunakan model klasik dan modern, dengan maksud maupun tujuan agar sesuai dengan lembaga pendidikan, pandangan kebijakan manajemen dalam menentukan mengenai proses dan penerapan kurikulum pada Madrasah Qudsiyyah sebagai berikut;

1. Proses yang dilakukan Madrasah dalam merumuskan masalah, serta menentukan kebijakan tentang menjaga tradisi kurikulum *salaf* ada beberapa fase, fase-fase itu saling berkaitan seperti; merumuskan sebuah masalah (mengenai kebijakan menjaga kurikulum *salaf*), mencari jalan keluar (solusi), implementasi serta mengevaluasi, dalam melakukan proses faktor penunjang yang dilakukan lembaga melalui, komunikasi, menyesuaikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh lembaga, melihat struktur organisasi, semua ini dimaksudkan agar dapat menentukan kebijakan dari manajemen yang sesuai dan bijaksana.
2. Dalam Implementasi kebijakan manajemen dalam menerapkam kurikulum *salaf* untuk pembelajaran dari manajemen puncak masih tetap melestarikan budaya yang ada (budaya dari pendiri Madrasah), walaupun ada beberapa perubahan kurikulum dari Depag serta Sisdiknas maupun

struktur organisasi pada lembaga Madrasah Qudsiyyah telah berganti sesuai priode., yang membedakan hanya teknis sesuai dengan alokasi waktu.

B. Saran-saran dan Kritik

- a) Manajemen puncak telah melakukan proses merumuskan serta menentukan kabijakan secara tertutup, proses seperti ini ada kendala tersendiri bagi lembaga, bagi manajemen lini serta manajemen tengah secara tidak langsung dikesampingkan dalam wewenang menentukan sebuah kebijakan. Alangkah bagusnya Madrasah lebih terbuka dalam merumuskan serta menentukan sebuah kebijakan.
- b) Untuk penerapan kurikulum salaf harus mempunyai inovasi-inovasi serta lebih kreatif dalam pembelajaran dari manajemen puncak, seperti dalam pembelajaran kurikulum *salaf* menggunakan teknologi IPTEK sebagai sarana pendukung.
- c) Bagi pemerintahan yang berkompeten dalam dunia pendidikan agar memberi ruang bagi madrasah-madrasah yang masih menggunakan kurikulum lokal dalam pembelajaran, karena tarbiyyah dengan ta'lim sangat berbeda namun tetap berhubungan.
- d) Elemen-elemen masyarakat sangat berbeda dalam segi kebutuhan untuk memperdalam keilmuan agama serta ilmu umum, dalam praktiknya anggapan masyarakat kurikulum saling berkaitan.

- e) Ilmu pengetahuan itu sama. Jadi, Idealnya bagi lembaga pendidikan khususnya Madrasah Qudsiyyah harus mengaplikasikan antara kurikulum *salaf* serta kurikulum dari pemerintahan, dan memilih mana yang *qodim dan jadid* agar seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Sholichin, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. 2008.
- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Arsyad Azhar, *Pokok-Pokok Manajemen Pengetahuan Praktis bagi Pimpinan dan Eksekutif*, Yogyakarta : pustaka Pelajar
- Ari Kunto Suharsimi dan Yuliana Lia, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media 2008.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bintoro Nur Muhammad, *Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Di SMP “ Remaja ” Parakan (tinjauan Historis)*, Uin Suka Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2005.
- Budiarjo Miriam dan Nuke Tri Pudjiastuti, *Teori-teori Politik Dewasa Ini*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Chan Sam M dan Sam Tuti T, *Analisis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- H.A.R. Tilaar dan Nugroho Riant, *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008.
- Hasibuan Malayu, *Manajemn Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Idi Abdulloh *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Gama Media, 2005
- Rekontruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Departemen Agama Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam).
- Keputusan Menteri Agama RI NO. 370 Tahun 1993, *Tentang Madrasah Aliyyah Pasal 1 Ayat Dalam Departemen Agama RI, Himpunan Perundang-undangan Tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)*, Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998.

- Komarudin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- YS. Marjo, *Kamus Populer*, Surabaya: Beringin Jaya, 1997
- Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 2003.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997.
- Majalah Tahunan, El-Qudsy Wahana Kreasi dan Ekspresi, Persatuan Pelajar Qudsiyyah Priode 1415: Edisi 15/2007
- Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara 2008.
- Nasrulloh, *Dinamika Kurikulum Madrasah Aliyah Pasca UU No.2 Tahun 1989. (Studi Atas Kebijakan Departemen Agama)*, Uin Suka Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2004.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Partanto A Pius, Al Barry M.Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola 1994.
- Radar Kudus, *Dalam Acara Ma'had Qudsiyyah diresmikan*
- Surat Keputusan, *Tentang Penetapan Pembagian Tugas Pelayanan Administrasi* 15-Nopember 2010.
- Steiner George A dan B John Miner, *Kebijakan dan Manajemen Strategi*, Jakarta: Erlangga 1997.
- Suharto Edi, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung : Alfabeta 2008.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009.
- Wasito Wojo dan W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris Inggris-indonesia*, Bandung : Bandung Hasta 1980.

Zainiah Chotimatul, *Kebijakan Pendidikan Orde Baru dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum (Studi Atas Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 1994*, Uin Suka Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2004.

[www. Qudsiyyah. com](http://www.Qudsiyyah.com)

Wawancara Dengan Bapak Ali Yahya

Wawancara Dengan Bapak Fakhrudin

Wawancara Dengan Bapak Noor Khalim

Wawancara Dengan Bapak Akhsin

LAMPIRAN-LAMPIRAN



IDENTITAS MADRASAH QUDSIYAH KUDUS

مدرسة قدسية

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : Madrasah Aliyah Qudsiyyah |
| 2. Nomor Statistik (NSM) | : 312331902141 |
| 3. Provinsi | : Jawa Tengah |
| 4. Kabupaten | : Kudus |
| 5. Kecamatan | : Kota |
| 6. Desa/Kelurahan | : Kerjasan |
| 7. Jalan | : K.H.R. Asnawi Gang Kerjasan |
| 8. Kode Pos | : 59317 |
| 9. Telp./Fax | : 0291 439422 |
| 10. Daerah | : Perkotaan |
| 11. Status Madrasah | : Swasta |
| 12. Nomor Piagam Pendirian | : L.K/32/10/P9m/M.A.A/1978 |
| 13. Tahun Berdiri | : 1-10-1973 |
| 14. Kegiatan Belajar | : Pagi Hari |
| 15. Lokasi Madrasah | : 3 km dari Kecamatan
1 km dari Kabupaten |
| 16. Organisasi Penyelenggara | : Yayasan (YAPIQ) |
| 17. Status Tanah | : Wakaf |
| 18. Luas Tanah | : 2.406 m ² |
| 19. Status Bangunan | : Milik Sendiri |
| 20. Luas Bangunan | : 1.900 m ² |





SIFAT, VISI DAN MISI
MADRASAH QUDSIYAH KUDUS

مدرسة قديية

SIFAT

Madrasah penyelenggara pendidikan
beraqidah Islam *ala ahlissunnah wal jama'ah*
menurut pandangan ulama Salaf.

VISI

Terwujudnya insan *tafaqquh fiddin*
beramal shalih, berakhlaq karimah dalam rangka
mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrowi.

MISI

Menanamkan ajaran Islam dan ilmu-ilmu terkait
secara terpadu melalui pendidikan formal, non formal,
maupun informal, dilaksanakan secara Islami,
dan terjangkau segala lapisan masyarakat.

Datar Dewan Guru Madrasah Aliyah Qudsiyyah.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	KH. M. Sya'roni Ahmad	Guru	Ponpes
2	KH. Fathur Rahman BA	Guru	Ponpes
3	KH. Noor Halim Ma'rif	Guru	Ponpes
4	KH. Drs. Em Najib Hasan	Guru	Perguruan Tinggi
5	KH. Saifudin Luthfi	Guru	Ponpes
6	KH. Abdul Hafidh Sathori	Guru	Ponpes
7	KH. Mahfudh Siddiq	Guru	Ponpes
8	Fakhrudin, S.Pd.I	Kepala MA	Perguruan tinggi
9	Durrun Nafis, SE	Guru	Perguruan Tinggi
10	Nur Hamid	Guru	Ponpes
11	M. Yusrul Hana, S.Ag	Guru	Perguruan Tinggi
12	Abdul Wahab	Guru	Ponpes
13	Drs. Ali Ridho	Guru	Perguruan Tinggi

14	Abdul Azizi SY	Guru	Ponpes
15	Noor Kholis, S.Ag.	Guru	Perguruan Tinggi
16	Charis, BA.	Guru	Ponpes
17	Tubagus Mansur S. Ag.	Waka Saprasi	Perguruan Tinggi
18	H. Ahmad Asnawi	Guru	Ponpes
19	KH Abdul Hafidh Satori	Guru	Ponpes
20	Muqorobun S. Pd.I	Guru	Perguruan Tinggi
21	Drs. Amin Wildan	Guru	Perguruan Tinggi
22	Syaiun	Guru	Ponpes
24	Ali Yahya M. Pd.	Guru	Perguruan Tinggi
25	Hilal Haidar	Waka Humas	Ponpes
26	Himmatul Fuad M. Si	Guru	Perguruan Tinggi
27	Saaduddin Annasih, Lc.	Guru	S.1 Al Azhar Cairo
28	Musthafa	Pegawai	SLTA
29	Masykuri	Kepala Perpus	Ponpes

30	Fathin Nizam	Pegawai	SLTA
31	Moh. Mifrohul Hana	Pegawai	SLTA
32	Aris Uriyanto	Pegawai	SLTA
33	Hasan Ruskandar	Penjaga	SLTA

Lampiran

RANCANGAN INTERVIEW DENGAN PIHAK TERKAIT.

1. Apa arti dari kebijakan?
2. Sejak kapan kebijakan itu ada?
3. Apa Arti Kurikulum salaf?
4. Bagaimana proses merumuskan dan membuat kebijakan?
5. Bagaimana implementasi kurikulum salaf?
6. Apa sebab-sebab adanya kebijakan tentang kurikulum salaf?
7. Siapa aktor-aktor yang terlibat dalam merumuskan dan membuat kebijakan?
8. Adakah evaluasi sesudah kebijakan ditentukan?
9. Apakah hasil kebijakan itu bentuk dari sebuah output madrasah?
10. Apakah bapak ikut dalam merumuskan dan menentukan kebijakan?
11. Bagaimana anda merespon tentang kebijakan madrasah tentang kurikulum?
12. Dari Manajemen apakah hanya menggunakan kurikulum salaf?

DATA MENTAH WAWANCARA

Hasil wawancara di Kantor Madrasah Qudsiyyah
pada tanggal Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB

“...kebijakan itu ya keputusan, sedangkan kebijakan ada sejak berdiri madrasah ini ada tapi yang lain pengurus lain lagi penerapannya..., dalam menentukan proses dua kali tahapan (secara internal dan eksternal), internal itu dari pengurus yang berpengaruh seperti ketua dan sekretaris serta dewan nadhir..., aktornya ya yang pokok itu dari yayasan yapiq yang palng berkopetensi Bapak Ikhsan kalo aktor aktifnya dan sebagai sutradara Bapak K.H Sya’roni Ahmadi, lalu dewan pengurus dan guru, .aktor

pasifnya santri dan masyarakat karena secara langsung hasil kebijakan kurikulum siswa dan masyarakat merasakannya.....sebagai kepala sekolah ya ikut.....kalo tidak terus bagaimana?....keputusan tentang kurikulum di sini sangat bijak dan masih relevan diteraakan dalam madrasah...untuk melakukan evaluasi kami melakukannya sesudah Mid semester itu pasti kami lakukan tujuanya untuk mengontrol kinerja para dewan guru dan perkembangan siswa....”¹ jelas, kebijakan kurikulum salaf sebagai hasil akhir karna tidak dapat di ganti dengan kurikulum umum. “....Semua kebijakan di Madrasah Qudsiyyah pada umumnya lahir dari rumusan dan keputusan yayasan, yaitu *Yapiq* akan tetapi secara lebih khusus pelaksanaanya di serahkan sesuai tingkatan, MI, MTS, MA dimaksudkan agar tidak tumpang tindih dalam menjalankan kegiatan organisasi”.² “....Ada beberapa hal yang harus kami perhatikan dalam membuat kebijakan mengenai tugas dan peran guru serta pegawai di Madrasah Qudsiyyah, yakni aspek ketegasan, saling menghormati dan toleransi, kebijakan itu seperti di bawah ini”³ kurikulum salaf adalah pembelajaran yang fokus ke *ukhrowi*, karena pelajaran yang membahas *ukhrowi* akan menyangkut ilmu duniawi, akan tetapi sebaliknya yang menyangkut pelajaran duniawi belum tentu menyangkut *ukhrowi*”.⁴

Selama ini di Madrasah Qudsiyyah, dari tahun 1950-1968 sampai sekarang tetap mengacu kurikulum *salaf*, atas dasar “Ikutilah Kebaikan Dari Yang Terdahulu”⁵ “....alasan yang mendasar tetap menggunakan kurikulum salaf ya....,karena Allah

¹ Hasil wawancara dengan bapak Fahrudin di Kantor Madrasah Qudsiyyah pada tanggal Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB

² Wawancara Dengan Bapak Ali Yahya (Waka Kurikulum Madrasah Aliyah), Sabtu 14 Desember 2010 pukul 09:00-10:00 WIB.

³ Wawancara Dengan Bapak Fakhruddin (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB.

⁴ Wawancara Dengan Bapak Noor Khalim (Mudirul Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Noor Khalim (Mudirul Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB.

menyukai orang-orang yang senang dalam mempelajari ilmu agama....(kurikulum *salaf*)”⁶

kalo ilmunya tetap sama....tapi dalam dunia pendidikan ada perbedaan yang mendasar yakni kurikulum lokal (*salaf*) yang bergelut dalam ta’lim dan kurikulum dari pemerintahan yang lebih menonjolkan tarbiyyah. Faktor inilah yang membuat perdebatan panjang karena dua kurikulum tersebut tidak dapat terpisahkan. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik benang merahnya dunia pendidikan tidak hanya bersifat untuk memintarkan anak didik akan tetapi merubah akhlaq itupun lebih penting.....”⁷

“.....Karena kebodohan adalah pintunya syaithon khususnya bodoh mengenai ilmu agama.....”⁸

“ Untuk membuat keputusan serta merumuskan mengenai kebijakan kurikulum *salaf*, ada beberapa fase, merumuskan masalah dalam rapat, memberi gagasan solusi, menerapkannya, serta mengevaluasi”⁹ Gini ya....Komunikasi adalah yang paling utama dalam menjalankan langkah-langkah kebijakan (berkomunikasi artinya di perbincangkan sebelum melakukan agenda rapat) lalu melihat potensi sumber daya manusia (pengajar, sarana pendukung lainnya) dan struktur organisasi yang ada”¹⁰

“....Sebenarnya dalam komunikasi yang membicarakan proses adanya kebijakan kurikulum di Madrasah ada yang bersifat *Intern dan Eksternal*....., yang bersifat *intern*, yakni antar pengurus satu sama lain berkomunikasi, akan tetapi tidak dalam rapat terbuka, apabila dalam merumuskan kebijakan di lingkup pengurus sudah mendapatkan keputusan yang di setuju semua jajaran pengurus baru akan dirapatkan

⁶ Wawancara Dengan Bapak Noor Khalim (Mudirul Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB.

⁷ Wawancara Dengan Ahmad Mustofa Bisri (Cendekiawan Muslim dan Pengasuh Pondok Roudotut Thalibin) Selasa 11 Januari 2011 pukul 11:00-11:30 WIB.

⁸ Wawancara Dengan Bapak Noor Khalim (Mudirul Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB.

⁹ Wawancara Dengan Bapak Fakhruddin (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Fakhruddin (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB.

dengan seluruh dewan guru-guru Madrasah....”¹¹“....Dalam lembaga organisasi Madrasah Qudsiyyah aktor central ataupun tokoh yang berpengaruh pada organisasi ialah Dewan Nadhir, yakni: KH. Sya’roni Ahmadi, ini meliputi semua aspek organisasi hanya saja secara teknis yang menjalankannya seluruh jajaran organisasi¹² “.....pihak Madrasah sendiri tetap menggunakannya namun dengan porsi yang lebih sedikit.....akan tetapi strategi agar murid yang menghadapi ujian jam pelajarannya ditambah mau tidak mau pulang jam 5 sore.....”¹³

“.... kurikulum salaf dari madrasah yang terdiri pelajaran agama Islam (kurikulum muatan lokal) dan kurikulum dari Diknas serta Depag dapat menjadikan siswa dapat menguasai Ilmu terapan dan agama sehingga siswa memiliki wawasan luas akan tetapi perlu juga adanya korelasi antara keduanya, sehingga pengaplikasian ilmu terapan dapat diseimbangi dengan tatanan syara’, misalnya imu ekonomi yang dijlankan dengan sistem muamalah (dalam ilmu fiqh).¹⁴ “.... karena ya..... pelajaran di Madrasah ini melebihi lainnya terutama pelajaran salafnya sehingga santri (siswa) bisa menjalankan perintah Allah berdasarkan Tafaquh Fiddin, ikhlas beramal seta berguna dan bermanfaat bagi masarakat.¹⁵ “...Masih relefan diterapkanya di Madrasah, pengalaman saya membentuk tuntunan yg pakem, artinya menjadi pegangan dasar tapi tidak secara tekhnis sperti SMK karena SMK itu hanya secara tekhnis artinya mempelajari serba tekhnis suatu contoh siswa di ajar untuk mengetahui

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Fakhruddin (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB.

¹² Wawancara Dengan Bapak Fakhruddin (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB.

¹³ Dengan Bapak H. Noor Khalim (Mudirul AM Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 10:00-11:00 WIB.

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Noor Khalim (Mudirul AM Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 10:00-11:00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan siswa MA Qudsiyyah, Ahmad Arinal Haq (Pimpinan Redaksi Majalah El-qudsy), Rabu 20 Oktober 2010.

¹⁶ Wawancara dengan siswa MA Qudsiyyah, Ristiyanto (Ketua Kelas XIc) Rabu 20 Oktober 2010.

Ilmu Elektro. Kalau tentang kurikulum *salaf* tidak secara teknis karena kehidupan membutuhkan pelajaran tentang moral untuk mengetahui agama”....¹⁶

“Adapun evaluasi yang sudah masuk agenda Madrasah Aliyah Qudsiyyah ya.... kami adakan tiap-tiap semester (pergantian tahun pelajaran), evaluasi ini meliputi segala aspek baik teknis dan tidak, serta evaluasi yang sifatnya *mendadak* ini di lakukan hanya bersifat komunikasi internal”.¹⁷

“....Sementara yang saya ketahui evaluasi pada Madrasah Qudsiyyah yang sifatnya menyeluruh dalam artian seluruh jajaran pengurus, anggota, dewan guru, dan elemen masyarakat terlaksana tiap-tiap satu tahun sekali...sering disebut forum sillaturrahim”

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Kharis, *Eks wartawan Kompas dan pengurus Ma'had Qudsiyyah*. Pada hari sabtu 11-Desember-2010, pukul 20:00 Wib.

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Fakhrudin (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah), Sabtu 11 Desember 2010 pukul 08:00-09:00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Khafidh Noor Faizi

Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 25 Desember 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat asal : Jl. Kudus-Jepara km. 4-5, Desa Garung Lor (RT 02-RW 01), Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Prop. Jawa Tengah (Jateng).

Alamat Yogyakarta : Pon-pes Al-Mujahadah DN 3/324 Lempuyangan Yogyakarta

Orang tua/ wali

Nama ayah : Sunarwan

Nama ibu : Sukarsih (Alm)

Alamat orang tua : Jl. Kudus-Jepara km. 4-5, Desa Garung Lor (RT 02-RW 01), Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Prop. Jawa Tengah (Jateng).

Asal Sekolah

1. SD : SDN 01 Garung Lor dan MI Qudsiyyah (1999)
2. SLTP : MTS Qudsiyyah (2003)
3. SMU : MA Qudsiyyah (Lulus tahun 2005)
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah Tahun Akademik 2006/2007

Yogyakarta, 1 Maret 2010

Khafidh Noor Faizi